

**ANALISIS PERBANDINGAN RASIO KEMANDIRIAN DAN
DESENTRALISASI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH ANTARA
KABUPATEN SOLOK DAN KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN 2014-2021**

TUGAS AKHIR

*Dilakukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Akuntansi (DIII)
Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



AZRI MUSTARI

2020 – 20133018

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI D III
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2023

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS PERBANDINGAN RASIO KEMANDIRIAN DAN
DESENTRALISASI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH ANTARA
KABUPATEN SOLOK DAN KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN 2014-2021**

Nama : Azri Mustari
NIM : 20133018
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Padang, Oktober 2023

Diketahui Oleh
Koordinator Program Studi
DIII Akuntansi



Mayar Afriyenti, SE, M.Sc
NIP. 1984013 200912 2 005

Disetujui Oleh
Pembimbing



Dian Fitri Handayani, SE, M.Sc
NIDN. 0010019103

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

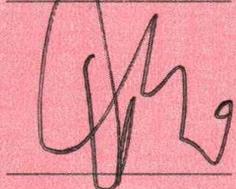
**ANALISIS PERBANDINGAN RASIO KEMANDIRIAN DAN
DESENTRALISASI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH ANTARA
KABUPATEN SOLOK DAN KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN 2014-2021**

Nama : Azri Mustari
NIM : 20133018
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir Program
Studi Akuntansi (DIII) Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Negeri Padang

Padang, Oktober 2023

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dian Fitria Handayani, SE, M.Sc	
Anggota 1	Dr. Deviani, S.E., AK, M.Si.	
Anggota 2	Jefriyanto, M.Ak.	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Azri Mustari
Tahun Masuk/NIM : 2020/20133018
Program Studi : Diploma III
Keahlian : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Alamat : Pinang Bungkuk Permai, Lubuk Buaya, Padang
Judul Tugas Akhir : Analisis Perbandingan Rasio Kemandirian dan Desentralisasi Keuangan Pemerintah Daerah antara Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2014-2021

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikutitata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, timpengeuji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, 22 September 2023

Yang menyatakan,



Azri Mustari
NIM. 20133018

ABSTRAK

Azri Mustari : **Analisis Perbandingan Rasio Kemandirian dan Desentralisasi Keuangan Pemerintah Daerah antara Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2014-2021**

Pembimbing : **Dian Fitria Handayani, SE, M. Sc.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan rasio kemandirian dan desentralisasi keuangan daerah pada Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan Tahun anggaran 2014-2021. Pada kurun waktu delapan tahun tersebut terdapat beberapa masalah yaitu: 1) Penerimaan pendapatan transfer yang terlalu tinggi, 2) Penerimaan Pendapatan Daerah yang masih rendah, 3) Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang tidak optimal. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian deskriptif kuantitatif yang menggunakan data sekunder yaitu Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2014-2021 yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat yang beralamat di Jalan Khatib Sulaiman No. 54 Padang, Sumatera Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan ditinjau dari: 1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tahun 2014-2021 untuk Kabupaten Solok memiliki rata-rata 6,85% dengan kriteria “rendah sekali” dan Kabupaten Solok Selatan memiliki rata-rata 8,35% dengan kriteria “rendah sekali”. 2) Rasio Desentralisasi Keuangan Daerah dari Tahun 2014-2021 untuk Kabupaten Solok memiliki rata-rata 6,20% dengan dengan kriteria “sangat kurang” dan Kabupaten Solok Selatan memiliki rata-rata 7,50%. Jadi rasio Kemandirian dan Desentralisasi keuangan Daerah Tahun 2014-2021 Kabupaten Solok Selatan lebih unggul daripada Kabupaten Solok.

Kata Kunci : Kinerja Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian, Rasio Derajat Desentralisasi.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan Syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya dengan membukakan hati dan pikiran penulis sehingga penyusunan Tugas Akhir ini dapat diselesaikan dengan baik yang berjudul “Analisis Perbandingan Rasio Kemandirian dan Desentralisasi Keuangan Pemerintah Daerah antara Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2014-2021”

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak tentu tidak akan dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Untuk itu melalui tulisan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkahan nikmat dan kurunianyalah Tugas Akhir Ini dapat terselesaikan.
2. Teristimewa penulis ucapkan kepada Orang Tua penulis yang sudah mengorbankan banyak hal dan memberikan motivasi, doa, ridho, dan dukungan baik materil maupun non materil kepada anaknya sehingga mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini.
3. Bapak Dekan dan Bapal/Ibu pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
4. Ibu Mayar Afriyenti, SE, M.Sc. Sebagai ketua Prodi D III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
5. Ibu Nurzi Sebrina, SE, AK, M.Sc. selaku Dosen Pembimbing Akademik

6. Ibu Dian Fitria Handayani, SE, M. Sc. Selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir dan Magang yang telah banyak meluangkan waktunya dalam membimbing dan memberikan masukan-masukan yang bermanfaat bagi penulis.
7. Dosen-dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negri Padang
8. Dan kepada semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis sangat menyadari dengan sepenuhnya bahwa Tugas akhir ini baik isi maupun pembahasannya masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan senang hati.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Dan semoga ALLAH SWT melimpahkan rahmat dan karunia- Nya kepada kita semua.

Padang, 25 Agustus 2023

Azri Mustari

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II	10
TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Keuangan Daerah.....	10
1.Pengertian Keuangan Daerah	10
2.Ruang Lingkup Keuangan Daerah	10
3.Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah	12
4.Laporan Keuangan Daerah	14
B. Analisis Kinerja Keuangan Daerah.....	19
C. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.....	25
D. Standar Akuntansi Pemerintah.....	28
E. Basis Akuntansi.....	29
1.Basis Kas (Cash Basis).....	31
2.Basis Akrual (Accrual Basis).....	32
BAB III	34
METODE PENELITIAN	34
A. Bentuk Penulisan Tugas Akhir.....	34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	35
1.Lokasi Penelitian	35

2. Waktu Penelitian.....	35
C. Rancangan Penelitian.....	35
1. Jenis Penelitian	35
2. Tahap Penelitian	35
3. Objek Penelitian	37
4. Sumber Data Penelitian	37
D. Teknik Analisis Data	38
BAB IV	40
PEMBAHASAN	40
A. Gambaran Umum Instansi	40
1. Sejarah Singkat Kabupaten Solok	40
2. Logo, Visi, Misi Kabupaten Solok	44
3. Sejarah Singkat Kabupaten Solok Selatan	45
4. Logo, Visi, Misi Kabupaten Solok	48
B. Temuan dan Pembahasan	49
1. Kabupaten Solok	49
2. Kabupaten Solok Selatan.....	60
3. Perbandingan Rasio Kabupaten Solok dan Solok Selatan	70
BAB V.....	75
KESIMPULAN	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN.....	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Total Pendapatan Kab. Solok dan Kab. Solok Selatan Tahun Anggaran 2014-2021	6
Tabel 2. 1 Tingkat Kemampuan Daerah.....	21
Tabel 2. 2 Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal	25
Tabel 4. 1 Daftar Kecamatan dan Kelurahan Di Kabupaten Solok	42
Tabel 4. 2 Daftar Kecamatan dan Kelurahan Di Kabupaten Solok Selatan.....	47
Tabel 4. 3 Rasio Kemandirian Keuangan Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2014-2021.....	50
Tabel 4. 4 Rasio Derajat Desentralisasi Pendapatan Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2014-2021	56
Tabel 4. 5 Rasio Kemandirian Keuangan Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2014-2021	61
Tabel 4. 6 Rasio Derejat Desentralisasi Keuangan Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2014-2021	66
Tabel 4. 7 Perbandingan Rasio Kemandirian Kabupaten Solok dan Solok Selatan Tahun 2014-2021	70
Tabel 4. 8 Perbandingan Rasio Derajat Desentralisasi Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2014-2021	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Logo Kabupaten Solok	44
Gambar 4. 2 Logo Kabupaten Solok Selatan	48

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Perhitungan Rasio Kemandirian Kabupaten Solok Tahun 2014-2021	81
Lampiran 2 Perhitungan Rasio Desentralisasi Kabupaten Solok Tahun 2014-2021	82
Lampiran 3 Perhitungan Rasio Kemandirian Kabupaten Solok Selatan Tahun 2014-2021	83
Lampiran 4 Perhitungan Rasio Desentralisasi Kabupaten Solok Selatan Tahun 2014-2021	84
Lampiran 5 Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2015	85
Lampiran 6 Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2016	87
Lampiran 7 Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2017	89
Lampiran 8 Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2018	91
Lampiran 9 Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2019	94
Lampiran 10 Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2020	97
Lampiran 11 Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2021	100
Lampiran 12 Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2015	103
Lampiran 13 Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2016	106
Lampiran 14 Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2017	108
Lampiran 15 Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2018	111
Lampiran 16 Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2019	113
Lampiran 17 Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2020	116
Lampiran 18 Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2021	118

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Pasal 1, ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu tujuan utama pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Sehubungan dengan itu, pemerintah berupaya untuk mewujudkan keseimbangan fiskal dengan mempertahankan kemampuan keuangan negara yang bersumber dari pendapatan pajak dan sumber-sumber lainnya guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu ciri yang penting dalam mewujudkan keseimbangan tersebut adalah berlangsungnya proses politik untuk menyelaraskan

berbagai kepentingan masyarakat (Halkadri, 2019:2). Lembaga Pemerintah Daerah sebagai pihak yang telah diberi amanah oleh rakyat untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan harus mampu mempertanggungjawabkan kinerja kepada rakyat dengan melaporkan laporan keuangan yang disusun pada akhir tahun anggaran. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam APBD yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Keuangan memiliki peran untuk memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah juga berfungsi sebagai dasar dalam mengambil keputusan sehingga laporan tersebut harus dibuat secara sederhana agar mudah dipahami oleh pembaca laporan. Kewajiban pemerintah dalam melaporkan pertanggungjawaban laporan keuangan untuk menilai apakah pemerintah daerah telah berhasil dalam menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak, salah satu cara untuk menganalisis kinerja pemerintah tersebut adalah dengan Rasio Keuangan.

Menurut Juddy dan Jenny (2017:1), Analisis Rasio Keuangan adalah suatu ukuran untuk mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diajukan dengan cara menghitung Kinerja keuangan daerah dan Kemampuan Keuangan Daerah. Penggunaan analisis rasio keuangan sebagai alat

analisis kinerja keuangan secara luas ditetapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial, sedangkan pada lembaga publik khususnya pemerintah daerah masih sangat terbatas sehingga secara teoritis belum ada kesepakatan yang bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Dalam rangka pengelolaan keuangan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel (Mardiasmo, 2002:169). Ada beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas pemerintah daerah diantaranya rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio derajat desentralisasi fiskal.

Rasio kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah tanpa mengharapkan transfer dana dari pemerintah pusat ataupun dari pinjaman (Halim, 2008:233). Menurut Fitra (2019:215) Rasio kemandirian keuangan dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah bermakna juga semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya. Semakin tinggi rasio kemandirian berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi untuk pemerintah kabupaten/kota) semakin rendah. Apabila semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah merupakan komponen utama PAD sudah

dapat terealisasi sehingga ketergantungan daerah terhadap transfer yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Otoritas Khusus semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi. Secara rata-rata nasional, PAD hanya memberikan kontribusi 12-15% dari total penerimaan daerah, sedangkan kurang lebih 70% masih menggantungkan bantuan dari pemerintah pusat (kemendagri).

Rasio derajat desentralisasi fiskal menggambarkan besarnya campur tangan pemerintah pusat dalam pembangunan daerah yang menunjukkan tingkat kesiapan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah, Semakin tinggi rasio derajat desentralisasi fiskal, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan daerah dalam mendukung otonomi daerah, Rasio derajat desentralisasi fiskal dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah, Menurut Bisma (2010:78) mengatakan, bahwa : "Tingkat desentralisasi fiskal adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan".

Kabupaten Solok merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Ibu kota Kabupaten Solok terletak di Arosuka. Sumber pendapatan terbesar Kabupaten ini terletak di sektor pertanian. Hal ini ditunjukkan dengan sumbangan sektor pertanian terhadap PDRB kabupaten Solok sekitar 37.71%. Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok sumber utama

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dari dinas-dinas, dan penerimaan lain-lain.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003 Kabupaten Solok dimekarkan menjadi dua kabupaten yaitu Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan dengan ibu kota di Padang Aro. Sumber daya alam di daerah dataran tinggi dengan gunung-gunung dan perbukitan daerah pertanian merupakan modal dan kekuatan untuk meningkatkan ekonomi daerah, mengandung potensi yang sangat menjanjikan serta potensi ekonomi bidang pertambangan, kehutanan, perkebunan, tanaman pangan, peternakan, serta pariwisata dan potensi lainnya.

Keberhasilan suatu daerah tercermin dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang meningkat setiap tahunnya. Peningkatan tersebut bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi pada setiap sektor yang membaik, dan meningkatkan dari taraf hidup masyarakat. Sehingga kemandirian suatu daerah dapat dilihat seberapa besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah itu tidak hanya berasal dari pemerintah pusat, tetapi juga berasal dari pendapatan daerah itu sendiri. Berikut pendapatan Daerah Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan tahun 2014 sampai dengan tahun 2021.

Tabel 1. 1
Total Pendapatan Kab. Solok dan Kab. Solok Selatan
Tahun Anggaran 2014-2021

Daerah	Tahun	Total Pendapatan Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Transfer
Kab. Solok	2014	988.804.498.525,00	51.502.148.550,00	936.616.143.196,00
	2015	1.101.484.693.326,25	55.610.732.918,25	1.030.826.806.208,00
	2016	1.128.678.628.074,52	58.803.477.232,52	1.066.765.102.592,00
	2017	1.086.038.302.349,73	54.754.332.725,73	1.021.162.705.982,00
	2018	1.163.604.738.667,08	68.301.516.506,08	1.041.835.273.093,00
	2019	1.254.704.484.574,82	74.595.911.758,82	1.115.789.009.816,00
	2020	1.139.147.681.879,33	70.572.545.436,33	1.083.963.188.221,00
	2021	1.216.306.520.994,31	75.855.094.773,31	1.006.247.096.443,00
Kab. Solok Selatan	2014	630.492.374.821,16	32.342.605.637,17	595.659.027.818,00
	2015	739.447.807.717,64	41.207.396.925,64	678.205.263.792,00
	2016	776.513.084.983,00	51.138.125.857,00	724.594.959.126,00
	2017	795.830.635.611,93	75.505.887.736,93	717.774.678.203,00
	2018	794.740.411.203,43	60.545.296.360,43	711.389.400.944,00
	2019	913.258.324.428,03	67.842.785.844,03	821.250.271.081,00
	2020	861.998.332.753,81	76.864.310.841,81	760.455.717.407,00
	2021	866.235.598.985,00	80.459.853.847,00	741.085.202.403,00

Sumber: Badan Pemeriksaan Keuangan

Dari tabel diatas dapat dilihat perkembangan Total Pendapatan Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer pada Kabupaten Solok dan Solok Selatan dalam delapan tahun, yaitu tahun 2014 sampai dengan tahun 2021 yang mengalami perubahan setiap tahunnya. Namun perubahan tersebut belum menggambarkan bagaimana Rasio Desentralisasi dan Rasio Kemandirian Keuangan Kabupaten Solok dan Solok Selatan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2021, apakah Rasio Desentralisasi dan Rasio Kemandirian mengalami peningkatan atau penurunan dan bagaimana kemampuan keuangan daerahnya berdasarkan Rasio Kemandirian dan derajat Desentralisasi.

Berdasarkan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Solok dan Solok Selatan dari besarnya peran pajak dan retribusi daerah yang menjadi sumber utama Pendapatan Asli Daerah sehingga membuatnya menjadi bagian yang sangat vital. Pemekaran yang terjadi antara Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan menjadi ketertarikan penulis dalam penelitian ini, untuk melihat apakah setelah pemekaran kedua daerah tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, dan apakah Pemerintahan Daerah sanggup dalam menjalankan tugasnya dimana Kabupaten Solok Selatan sendiri masih terbilang Kabupaten yang masih baru. Dengan didukung oleh latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merasa perlu dilakukan analisis kemandirian dan desentralisasi keuangan daerah Kabupaten Solok dan Solok Selatan pada tahun 2014-2021. Pengukuran kinerja keuangan daerah menggunakan rasio kemandirian dan desentralisasi sangat penting sekali dilakukan untuk menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah dan mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah agar pemerintah daerah dapat mengelola dan mengoptimalkan sumber daya daerahnya.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan menganalisis rasio kemandirian dan desentralisasi keuangan pemerintah daerah Kabupaten Solok dan Solok Selatan, dengan judul **“Analisis Perbandingan Rasio Kemandirian dan Desentralisasi Keuangan Pemerintahan Daerah Antara Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2014-2021”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat disimpulkan rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat analisis dan perbandingan rasio kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan pada tahun anggaran 2014-2021?
2. Bagaimana tingkat analisis dan perbandingan derajat desentralisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan pada tahun anggaran 2014-2021?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah ditetapkan, maka tujuan penelitian Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan membandingkan tingkat rasio kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan pada tahun anggaran 2014-2021.
2. Untuk menganalisis dan membandingkan derajat desentralisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan pada tahun anggaran 2014-2021.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang penulis lakukan, diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis, pemerintah daerah dan pihak lain yang membaca hasil penelitian ini.

1. Bagi Penulis

Untuk menemukan bukti empiris tentang kemandirian keuangan pemerintah daerah yang diteliti, serta untuk membandingkan teori yang didapat dari studi kuliah dengan kenyataan yang sebenarnya.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai tambahan bahan referensi dalam menganalisis Kemandirian dan Desentralisasi keuangan pemerintah daerah, sehingga diharapkan masing-masing pemerintah daerah mampu mengoptimalkan sumber Pendapatan Asli daerah dan sebagai alternatif masukan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah secara ekonomis, efisien, dan efektif demi tercapainya keberhasilan otonomi daerah.

3. Bagi Akademis

Sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di Universitas Negeri Padang.

4. Bagi Pihak Lain

Sebagai bahan yang berguna dalam menambah pengetahuan dan referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian di masa yang akan datang.